



**RESUME BERITA**  
**Selasa, 2 Juli 2019**

**Berita Pilihan**

**Seleksi Calon Anggota BPK**

<b>TONE</b>	<b>TANGGAPAN</b>
<input type="radio"/> Positif	<input checked="" type="radio"/> Tidak Perlu
<input checked="" type="radio"/> Netral	<input type="radio"/> Perlu
<input type="radio"/> Negatif	<input type="radio"/> Segera Tanggapi

Komisi XI tengah melakukan seleksi terhadap calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan untuk menggantikan lima anggota yang habis masa baktinya pada Oktober tahun ini. Berdasarkan data yang beredar, sudah ada 64 orang yang mendaftar sebagai calon anggota BPK dari berbagai latar belakang. Akan tetapi, pegiat antikorupsi mengkritik proses seleksi tersebut karena dinilai tidak transparan. Proses pemilihan anggota BPK yang dilakukan oleh DPR dengan pertimbangan DPD yang termaktub dalam UU tidak menyebutkan secara tegas bahwa DPR harus melakukan proses seleksi secara transparan. Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada Yuris Rezha Kurniawan mengatakan bahwa proses yang tidak transparan ini dikhawatirkan berpengaruh terhadap rekam jejak calon yang akan dipilih.

Kekhawatiran lain adalah berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, BPK adalah lembaga vital dalam rangka membantu penegakan hukum yang antikorupsi sehingga dikhawatirkan proses pemilihan yang tidak transparan ini akan membuat BPK dijabat oleh orang yang tidak memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi dan keuangan negara. Dengan demikian, ia mengingatkan Komisi XI DPR memiliki tanggung jawab yang besar untuk melakukan pemilihan secara transparan dan akuntabel mengingat BPK merupakan lembaga mandiri yang tidak bisa diintervensi.

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko menyatakan seharusnya proses pemilihan anggota BPK minimal bisa seperti seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lebih lanjut, Dadang menjelaskan bahwa setidaknya ada dua faktor utama yang mempengaruhi independensi para calon anggota BPK tersebut. Pertama, tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan partai. Kedua, rekam jejak integritas yang dimiliki para calon. Apalagi bila ditilik ke belakang, BPK saat ini memang dipimpin oleh beberapa politikus yaitu Achsanul Qosasi (Demokrat), Rizal Djalil (PAN), Isma Yatun (PDIP) dan Harry Azhar Azis (Golkar).

(Dari: "Pergantian Pimpinan Lembaga, Kawal Seleksi Calon Anggota BPK", *Bisnis Indonesia*, 2 Juli 2019)

## Bursa Efek tidak Suspensi Saham GIAA

TONE	TANGGAPAN
<input type="radio"/> Positif	<input checked="" type="radio"/> Tidak Perlu
<input checked="" type="radio"/> Netral	<input type="radio"/> Perlu
<input type="radio"/> Negatif	<input type="radio"/> Segera Tanggapi

PT Bursa Efek Indonesia menyatakan sejauh ini Garuda Indonesia dinilai telah kooperatif untuk segera memperbaiki laporan keuangan 2018 sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan sehingga PT BEI memutuskan untuk tidak menghentikan perdagangan sementara (suspensi) terhadap GIAA, emiten PT Garuda Indonesia Tbk.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna menyampaikan bahwa dalam melakukan suspensi atas sebuah emiten, pihaknya harus hati-hati dan selektif. Terkait hal itu, ada tiga hal yang dilihat BEI dalam memberikan hukuman suspensi yaitu apabila opini laporan keuangan emiten sampai dua kali mendapat *disclaimer*, apabila emiten menyajikan opini tidak wajar dalam laporan keuangan, dan ketika *going concern* perusahaan terganggu.

Dalam kasus laporan keuangan Garuda, pihaknya hingga kini masih menunggu GIAA untuk menyelesaikan laporan keuangan kembali sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

(Dari: "Bursa Efek tidak Suspensi Saham GIAA", Media Indonesia, 2 Juli 2019)

## KPK Bocorkan Ada Tersangka Baru Kasus E-KTP: Seorang Pengusaha

TONE	TANGGAPAN
<input type="radio"/> Positif	<input checked="" type="radio"/> Tidak Perlu
<input checked="" type="radio"/> Netral	<input type="radio"/> Perlu
<input type="radio"/> Negatif	<input type="radio"/> Segera Tanggapi

Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan akan ada tersangka baru atas kasus korupsi e-KTP dari unsur pengusaha dan birokrat. Terkait hal ini, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan soal tersangka yang baru akan diumumkan setelah gelar perkara. Adapun jumlah tersangka berjumlah lebih dari dua orang. Berdasarkan penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kerugian negara proyek e-KTP mencapai Rp 2,3 triliun sementara pengembalian uang hasil korupsi baru mencapai Rp 500 miliar.

(Dari: "KPK Bocorkan Ada Tersangka Baru Kasus E-KTP: Seorang Pengusaha", wartaekonomi.com, 2 Juli 2019)

## Lanjutkan Kasus RJ Lino, KPK Panggil Dua Saksi

TONE	TANGGAPAN
<input type="radio"/> Positif	<input checked="" type="radio"/> Tidak Perlu
<input checked="" type="radio"/> Netral	<input type="radio"/> Perlu
<input type="radio"/> Negatif	<input type="radio"/> Segera Tanggapi

Komisi Pemberantasan Korupsi pada 1 Juli 2019 memanggil dua saksi untuk tersangka Richard Joost Lino dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II. Dua saksi tersebut adalah ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Angkut PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Suismono dan pegawai PT Biro Klasifikasi Indonesia Akhmad Muliaddin. Dalam penyidikan kasus itu, tim KPK pada pekan lalu melakukan koordinasi dengan ahli terkait aspek teknis dalam perhitungan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan analisis perhitungan ahli teknik dari ITB serta eskalasi biaya akibat dari perbedaan waktu terdapat potensi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya 3.625.922 dollar AS atau sekitar Rp 50,03 miliar dari audit investigatif yang dilakukan oleh BPKP.

(Dari: "Lanjutkan Kasus RJ Lino, KPK Panggil Dua Saksi", *Republika*, 2 Juli 2019)

## KPK Datangkan Ahli Keuangan Negara di Sidang Dana Prokespen Krakatau Steel

TONE	TANGGAPAN
<input type="radio"/> Positif	<input checked="" type="radio"/> Tidak Perlu
<input checked="" type="radio"/> Netral	<input type="radio"/> Perlu
<input type="radio"/> Negatif	<input type="radio"/> Segera Tanggapi

KPK memfasilitasi jaksa penuntut umum untuk mendatangkan ahli keuangan negara dalam persidangan korupsi penggunaan dana senilai Rp 118 miliar pada Program Kesehatan Pensiun (Prokespen) karyawan PT Krakatau Steel (KS) di Yayasan Bapelkes KS Tahun 2013-2014.

Juru Bicara KPK Febri Diarsyah menjelaskan bahwa KPK melalui Unit Koordinasi dan Supervisi Penindakan dalam persidangan hari itu memfasilitasi kehadiran ahli keuangan negara Siswo Sujanto untuk memperkuat proses pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sidang akan dilanjutkan kembali pada Rabu, 3 Juli 2019 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari BPKP Banten.

(Dari: "KPK Datangkan Ahli Keuangan Negara di Sidang Dana Prokespen Krakatau Steel", *kompas.com*, 2 Juli 2019, "KPK Dukung Jaksa dalam Sidang Dana Pensiun Krakatau Steel", *republikanews.com*, 2 Juli 2019)

## Pemprov DKI akan Konsultasi ke BPKP-Kejaksanaan Terkait Pengelolaan Air

TONE	TANGGAPAN
<input type="radio"/> Positif	<input checked="" type="radio"/> Tidak Perlu
<input checked="" type="radio"/> Netral	<input type="radio"/> Perlu
<input type="radio"/> Negatif	<input type="radio"/> Segera Tanggapi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku proses pengalihan air dari swasta ke pemerintah tidak berjalan lancar karena belum adanya kesepakatan soal proses penyerahan. Anies menyatakan pemerintah provinsi berfokus pada peningkatan cakupan jaringan air untuk tetap bisa mencapai angka 80 persen pada tahun 2023. Pihak PAM juga sedang menyiapkan opsi-opsi untuk dibicarakan dengan BPKP dan Kejaksanaan apabila *Head of Agreement* dengan PT PAM Lyonnaise Jaya dan PT Aetra Air Jakarta selaku pengelola air dari swasta tidak mencapai kesepakatan. Anies ingin langkah yang diambil sesuai dengan hukum dan proses pengalihan pengelolaan air tetap berjalan.

(Dari: "Ambil Alih Pengelolaan Air, DKI akan Konsultasi ke BPKP - Kejaksanaan", detiknews.com, 2 Juli 2019, "Anies akan Panggil Manajemen Aetra Soal Gangguan Air", republikanews.com, 2 Juli 2019)

Bagian Humas dan HAL  
Biro Hukum dan Humas BPKP